



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN, DAN RATU BOKO  
(PERSERO)

**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PALWOTO
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN INVESTASI
3. NHK : 250065

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/130 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 5137 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Bangunan Seluas 25 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/178 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
5. Bangunan Seluas 44 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 265.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 263.800.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 25.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.014.298.833

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 11.305.098.833

**III. HUTANG** Rp. ----



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

11.305.098.833

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.